



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Jakarta, 6 April 2026

Nomor : 03/IV/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

Kepada Yth:
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Di Jalan K.H. Wahid Hasyim
Nomor 96A, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat - 10340

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 April 2026;
Waktu : 15.18 WIB - 16.20 WIB;
Tempat : Di The Club, Gedung Djakarta Theater,
Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No. 9,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng,
Jakarta Pusat 10340.

Kehadiran : Dewan Komisaris:	1.	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris Utama/Komisaris Independen
	2.	Melia Suherman	Komisaris
	3.	Harris Lasmana	Komisaris
	4.	Sacheen Harris Lasmana	Komisaris
	5.	Edwin Surya Winarta	Komisaris
	6.	Mohammad Noor Rachman Soejoeti	Komisaris Independen
	7.	Ariani Vidya Sofjan	Komisaris Independen
Direksi:	1.	Suryo Suherman	Direktur Utama
	2.	Arif Suherman	Direktur
	3.	Tri Rudy Anitio	Direktur
	4.	Dody Suhartono	Direktur

Pemegang Saham : 77.209.587.885 saham (94,5651432%) dari total 83.345.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Yang Dapat Diatribusikan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.



AULIA TAUFANI, S.H. **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
6. Persetujuan pengalihan saham hasil pembelian Kembali dengan cara distribusi saham hasil pembelian Kembali kepada pemegang saham secara proporsional dan sisanya akan dijual baik di Bursa Efek Indonesia maupun diluar Bursa Efek Indonesia.
7. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
8. Perubahan/Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan "OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "BEI") tanggal 19 Februari 2026 melalui surat nomor 05/CNMA-OJK/II/2026.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 26 Februari 2026 melalui Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI"), Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan, dan terkait Keterbukaan Informasi telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 13 Februari 2025 melalui Situs Web BEI dan Situs Web Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 13 Maret 2026 melalui Situs Web KSEI, Situs Web BEI, dan Situs Web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 (tiga) pertanyaan namun karena pertimbangan teknis akan dijawab terpisah oleh Perseroan.
- pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 831.058.600 saham atau sebesar 1,0763671% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 75.771.806.985 saham atau sebesar 98,1378208% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 76.378.529.285 saham atau 98,9236329% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2025;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

- 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Siddharta Widjaja & Rekan, auditor independen yang ditandatangani oleh Tohana Widjaja dengan No. AP.0846 sesuai dengan Lapornya No. 00042/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, dengan opini “Tanpa Modifikasian” (*Unmodified Opinion*) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“SAK Indonesia”).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan namun karena pertimbangan teknis akan dijawab terpisah oleh Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 700 saham atau sebesar 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 76.602.864.885 saham atau sebesar 99,2141870% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 77.209.587.185 saham atau 99,9999991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menetapkan penggunaan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham tahun 2025 sebesar Rp704,8 miliar (tujuh ratus empat koma delapan miliar rupiah) berikut:
 - a. Sebesar Rp8,63 (delapan koma enam tiga rupiah) per saham atau seluruhnya Rp704,6 miliar (tujuh ratus empat koma enam miliar rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Final untuk Tahun Buku 2025 yang dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham atau seluruhnya Rp408,3 miliar (empat ratus delapan koma tiga miliar rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim yang telah dibayarkan secara tunai pada tanggal 28 November 2025.
 - 2) Sebesar Rp3,63 (tiga koma enam tiga rupiah) per saham atau seluruhnya Rp296,3 miliar (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen final.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

2. Menetapkan penggunaan saldo laba ditahan untuk dibagikan sebagai dividen tambahan tahun buku 2025 sebesar Rp3,37 (tiga koma tiga tujuh rupiah) per saham atau seluruhnya Rp275,2 miliar (dua ratus tujuh puluh lima koma dua miliar rupiah).
3. Pembayaran dividen final dari laba bersih dan dividen dari laba ditahan akan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 April 2026 dan akan dibayarkan secara tunai pada tanggal 28 April 2026. Dividen yang dibayar tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 481.425.322 saham atau sebesar 0,6235305% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 76.121.440.263 saham atau sebesar 98,5906574% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 76.728.162.563 saham atau 99,3764695% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (*member of KPMG*) serta Akuntan Publik Ibu Tohana Widjaja sebagai auditor Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026. Selain itu, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut.
 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.
 3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H. **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 139.887.122 saham atau sebesar 0,1811784% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 76.462.978.463 saham atau sebesar 99,0330094% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 77.069.700.763 saham atau 99,8188216% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada waktunya akan dilaporkan dalam Laporan keuangan berkala yang akan diumumkan oleh Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pada Mata Acara Kelima karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :

Penawaran Umum Perdana saham Perseroan telah dilaksanakan dengan pernyataan efektif dari OJK No. S-186/D.04/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sejumlah 8.335.000.000 (delapan milliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham maka nilai emisi yang terkumpul adalah sebesar Rp2.250.450.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Sedangkan biaya penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp77.775.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Dengan demikian hasil bersih dana yang diperoleh dalam IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi adalah sekitar Rp2.172.675.000.000 (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Per 31 Desember 2025, atas dana tersebut telah digunakan sekitar Rp2.050.689.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
- 2) Pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop sekitar Rp1.230.689.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua juta Rupiah); dan
- 3) Penggunaan untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan sekitar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah).

Dengan demikian sisa dana yang belum digunakan adalah sekitar Rp121.986.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta Rupiah) dan saat ini disimpan dalam bentuk giro pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) dengan Tingkat bunga sebesar 4.25% per tahun.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 139.820.022 saham atau sebesar 0,1810915% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 76.463.045.563 saham atau sebesar 99,0330964% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 77.069.767.863 saham atau 99,8189085% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian Kembali (*treasury stock*) dengan cara distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan saham hasil pembelian kembali Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham;
 - b. menentukan rasio dan tata cara distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menetapkan daftar pemegang saham yang berhak menerima distribusi saham hasil pembelian kembali;
 - d. melakukan penyesuaian yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan distribusi saham hasil pembelian kembali, termasuk namun tidak terbatas pada aspek teknis dan administratif;
 - e. menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali; dan
 - f. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan serta yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pengalihan sisa saham hasil pembelian Kembali dengan cara dijual baik di Bursa Efek Indonesia maupun diluar Bursa Efek Indonesia.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 606.722.300 saham atau sebesar 0,7858121% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.498.839.585 saham atau sebesar 1,9412610% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 75.104.026.000 saham atau sebesar 97,2729269% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 75.710.748.300 saham atau 98,0587390% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Tuan Mohammad Noor Rachman Soejoeti dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan



AULIA TAUFANI, S.H. **NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatannya. Disertai dengan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan Mohammad Noor Rachman Soejoeti atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sehubungan dengan usulan di atas, maka selanjutnya susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan berubah menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Suryo Suherman
- Direktur : Arif Suherman
- Direktur : Tri Rudy Anitio
- Direktur : Dody Suhartono

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen: Ongki Wanadjati Dana
- Komisaris : Melia Suherman
- Komisaris : Harris Lasmana
- Komisaris : Sacheen Harris Lasmana
- Komisaris : Edwin Surya Winarta
- Komisaris Independen : Ariani Vidya Sofjan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mengusulkan untuk menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris, memberitahukan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
- Pada Mata Acara Kedelapan karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Kedelapan yaitu sebagai berikut :

Agenda ini diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat atas perubahan/penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 25 Maret 2026 bahwa "Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan dan Sistem OSS berdasarkan table konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar."

Berdasarkan hal tersebut, maka pada mata acara Kedelapan Rapat ini tidak perlu dilakukan pembahasan dan ditetapkan bahwa rapat "menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini tetap berlaku.”

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 April 2026 Nomor 8, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.





AULIA IAUFGANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Jakarta, 06 April 2026

Number : 03/IV/2026
Subject : Summary of the Annual General Meeting
of Shareholders
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk

To:
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Jl. K.H. Wahid Hasyim
No. 96A, Kebon Sirih, Menteng,
Central Jakarta - 10340

Dear Sir/Madam,

Herewith, I hereby convey the Summary of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") of "PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk", domiciled in Central Jakarta (hereinafter referred to as the "**Company**"), which was held on:

Day/Date : Monday, 6 April 2026;
Time : 15.18 WIB – 16.20 WIB;
Venue : The Club, Gedung Djakarta Theater,
3rd Floor, Jl. MH. Thamrin No. 9,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng,
Central Jakarta 10340.

Attendance : Board of 1. Ongki Wanadjati Dana President
Commissioners: Commissioner /
Independent
Commissioner
2. Melia Suherman Commissioner
3. Harris Lasmana Commissioner
4. Sacheen Harris Commissioner
Lasmana
5. Edwin Surya Winarta Commissioner
6. Mohammad Noor Rachman Independent
Soejoeti Commissioner
7. Ariani Vidya Sofjan Independent
Commissioner

Board of 1. Suryo Suherman President Director
Directors: Director
2. Arif Suherman Director
3. Tri Rudy Anitio Director
4. Dody Suhartono Director

Shareholders : 77,209,587,885 shares (94.5651432%) out of a total of
83,345,000,000 shares.



AULIA I AUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

I. MEETING AGENDA

1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year 2025 and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
2. Determination of the Use of Attributable Profit for the Financial Year 2025.
3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026
4. Determination of Salaries and Allowances for Members of the Board of Directors and Salaries or Honoraria and Allowances for Members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2026
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering
6. Approval for the transfer of treasury shares through the distribution of treasury shares to shareholders on a proportional basis, with the remaining shares to be sold either on the Indonesia Stock Exchange or outside the Indonesia Stock Exchange
7. Changes in the composition of the Company's management
8. Amendment/Adjustment to the Company's Purposes and Objectives and Business Activities

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE CONVENING OF THE MEETING

1. Notification regarding the plan to convene the Meeting has been submitted by the Board of Directors to the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the "OJK") and the Indonesia Stock Exchange (hereinafter referred to as the "IDX") on 19 February 2026 through letter No. 05/CNMA-OJK/II/2026.
2. The announcement of the Meeting to the Shareholders regarding the forthcoming invitation to the Meeting has been submitted by the Board of Directors to the OJK and IDX on 26 February 2026 through the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI"), the IDX website, and the Company's website. The Disclosure of Information has also been submitted by the Board of Directors to the OJK and IDX on 13 February 2025 through the IDX website and the Company's website.
3. The invitation to the Meeting to the Shareholders has been submitted by the Board of Directors to the OJK and IDX on 13 March 2026 through the KSEI website, the IDX website, and the Company's website.

III. RESOLUTIONS OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were 3 (three) questions; however, due to technical considerations, such questions will be responded to separately by the Company.
- Voting was conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 831,058,600 shares or representing 1.0763671% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 75,771,806,985 shares or representing 98.1378208% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor



AULIA I AUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

amounted to 76,378,529,285 shares or 98.9236329% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the First Agenda of the Meeting.

- **The resolution of the First Agenda of the Meeting is as follows :**

1. To approve and ratify:
 - a. The Company's Annual Report as presented by the Board of Directors for the Financial Year 2025;
 - b. The Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan, an independent auditor, signed by Tohana Widjaja with Public Accountant License No. AP.0846, in accordance with its Report No. 00042/2.1005/AU.1/05/0846-2/1/III/2026 dated 5 March 2026, with an "Unmodified Opinion," prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK Indonesia").
2. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
3. To grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions in relation to the First Agenda of the Meeting in a separate notarial deed and to notify the relevant authorities thereof.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there was 1 (one) question; however, due to technical considerations, such question will be responded to separately by the Company.
- The resolution was adopted through voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 700 shares or representing 0.0000009% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 76,602,864,885 shares or representing 99.2141870% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor amounted to 77,209,587,185 shares or 99.9999991% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the Second Agenda of the Meeting.

- **The resolution of the Second Agenda of the Meeting is as follows :**

1. To determine the appropriation of net profit after tax and non-controlling interests attributable to the shareholders for the financial year 2025 amounting to IDR 704.8 (seven hundred four point eight billion Rupiah), as follows:
 - a. An amount of IDR 8.63 (eight point six three Rupiah) per share or in total IDR 704.6 (seven hundred four point six billion Rupiah) shall be determined as Final Dividend for the financial year 2025, with the following details:
 - 1) An amount of IDR 5 (five Rupiah) per share or in total IDR 408.3 (four hundred eight



AULIA I AUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

point three billion Rupiah) has been distributed as interim dividend and was paid in cash on 28 November 2025.

- 2) An amount of IDR 3.63 (three point six three Rupiah) per share or in total IDR 296.3 (two hundred ninety-six point three billion Rupiah) shall be distributed as final dividend.
2. To determine the appropriation of retained earnings to be distributed as additional dividend for the financial year 2025 amounting to IDR 3.37 (three point three seven Rupiah) per share or in total IDR 275.2 (two hundred seventy-five point two billion Rupiah).
3. The payment of final dividend from net profit and dividend from retained earnings shall be distributed to shareholders recorded in the Register of Shareholders as of 16 April 2026 and shall be paid in cash on 28 April 2026. Such cash dividends shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax regulations.
4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to determine matters relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to arranging the procedures for the distribution of such cash dividends and announcing the same in compliance with the prevailing laws and regulations.

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present at the Meeting who raised any questions and/or opinions.
- The resolution was adopted through voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 481,425,322 shares or representing 0.6235305% of the total valid shares present at the Meeting
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 76,121,440,263 shares or representing 98.5906574% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor amounted to 76,728,162,563 shares or 99.3764695% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the Third Agenda of the Meeting.

The resolution of the Third Agenda of the Meeting is as follows :

1. To approve the appointment of Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (member of KPMG) and Public Accountant Ms. Tohana Widjaja as the auditor of the Company's Financial Statements for the financial year 2026. Furthermore, to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements in relation to such appointment.
2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including but not limited to the process of conducting meetings and the signing of the engagement letter for such Public Accounting Firm and/or Public Accountant.
3. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public



AULIA I AUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Accounting Firm and/or Public Accountant, for any reason whatsoever, is unable to perform its duties, in accordance with the prevailing regulations.

4. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including but not limited to the process of conducting meetings and the signing of the engagement letter for such Public Accounting Firm and/or Public Accountant.
5. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for any reason whatsoever, is unable to perform its duties, in accordance with the prevailing regulations.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present at the Meeting who raised any questions and/or opinions.
- The resolution was adopted through voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 139,887,122 shares or representing 0.1811784% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 76,462,978,463 shares or representing 99.0330094% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor amounted to 77,069,700,763 shares or 99.8188216% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the Fourth Agenda of the Meeting.

- **The resolution of the Fourth Agenda of the Meeting is as follows:**
 1. To approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium, salaries, facilities, allowances, and other remuneration packages for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2026, by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee as well as the financial condition of the Company.
 2. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation among members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to point 1 above, by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations.

Such matters shall be reported in due course in the Company's periodic financial reports to be announced by the Company.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Fifth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present



AULIA IAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

at the Meeting who raised any questions and/or opinions.

- As the Fifth Agenda is for reporting purposes, no resolution was adopted for this Agenda.
- The presentation of the Fifth Agenda is as follows :
The Company's Initial Public Offering (IPO) was conducted following the effective statement from the Financial Services Authority (OJK) No. S-186/D.04/2023 dated 25 July 2023, with a total of 8,335,000,000 (eight billion three hundred thirty-five million) new shares issued, resulting in total proceeds amounting to IDR 2,250,450,000,000.00 (two trillion two hundred fifty billion four hundred fifty million Rupiah).
The total offering expenses up to 31 December 2025 amounted to IDR 77,775,000,000.00 (seventy-seven billion seven hundred seventy-five million Rupiah).
Accordingly, the net proceeds obtained from the IPO after deducting the offering expenses amounted to approximately IDR 2,172,675,000,000 (two trillion one hundred seventy-two billion six hundred seventy-five million Rupiah).
As of 31 December 2025, the utilization of such funds amounted to approximately IDR 2,050,689,000,000.00 (two trillion fifty billion six hundred eighty-nine million Rupiah), with the following details :
 - 1) Partial repayment of principal loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) amounting to IDR 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah);
 - 2) Development and expansion of cinema networks amounting to approximately IDR 1,230,689,000,000.00 (one trillion two hundred thirty billion six hundred eighty-nine million Rupiah); and
 - 3) Utilization for working capital, including but not limited to the procurement of goods and services in support of the Company's business activities, amounting to approximately IDR 320,000,000,000.00 (three hundred twenty billion Rupiah).Accordingly, the remaining unused funds amount to approximately IDR 121,986,000,000.00 (one hundred twenty-one billion nine hundred eighty-six million Rupiah), which are currently placed in the form of demand deposits at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with an interest rate of 4.25% per annum.

SIXTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Sixth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present at the Meeting who raised any questions and/or opinions.
- The resolution was adopted through voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 139,820,022 shares or representing 0.1810915% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 76,463,045,563 shares or representing 99.0330964% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor amounted to 77,069,767,863 shares or 99.8189085% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the Sixth Agenda of the Meeting..



AULIA IAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

- **The resolution of the Sixth Agenda of the Meeting is as follows :**
 1. To approve the Company's plan to implement the transfer of shares resulting from the share buyback (treasury stock) through the proportional distribution of such shares to the shareholders, with due observance of the prevailing laws and regulations, including the regulations of the Financial Services Authority.
 2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, whether in part or in full, to carry out all necessary actions in connection with the transfer of the Company's treasury shares, including but not limited to:
 - a. determining the schedule for the distribution of treasury shares to the shareholders;
 - b. determining the ratio and procedures for the proportional distribution of treasury shares to the shareholders in accordance with the applicable regulations;
 - c. determining the list of shareholders entitled to receive the distribution of treasury shares;
 - d. making any necessary adjustments in relation to the implementation of the distribution of treasury shares, including but not limited to technical and administrative aspects;
 - e. executing all documents required for the implementation of the transfer of treasury shares; and
 - f. taking all necessary and/or required actions and any actions deemed appropriate by the Board of Directors of the Company in connection with the implementation of the transfer of treasury shares, with due observance of the prevailing laws and regulations.
 3. To grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the transfer of the remaining treasury shares through sale, either on the Indonesia Stock Exchange or outside the Indonesia Stock Exchange.

SEVENTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Seventh Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present at the Meeting who raised any questions and/or opinions.
- The resolution was adopted through voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders and/or their proxies who abstained amounted to 606,722,300 shares or representing 0.7858121% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. Shareholders and/or their proxies who voted against amounted to 1,498,839,585 shares or representing 1.9412610% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. Shareholders and/or their proxies who voted in favor amounted to 75,104,026,000 shares or representing 97.2729269% of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 47 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority of shareholders casting votes. Accordingly, the total votes in favor amounted to 75,710,748,300 shares or 98.0587390% of the total valid shares present at the Meeting, thereby approving the proposed resolution for the Seventh Agenda of the Meeting.

- **The resolution of the Seventh Agenda of the Meeting is as follows :**
 1. To accept the resignation of Mr. Mohammad Noor Rachman Soejoeti from his position as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with appreciation for his contributions during his tenure. Such acceptance is accompanied by the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. Mohammad Noor Rachman Soejoeti for his supervisory actions carried out during his tenure as Independent Commissioner



AULIA I AUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

- of the Company, to the extent that such actions are reflected in the financial statements and do not constitute any criminal act or violation of the prevailing laws and regulations.
2. In connection with the above, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company shall be as follows:
- Board of Directors
- President Director : Suryo Suherman
 - Director : Arif Suherman
 - Director : Tri Rudy Anitio
 - Director : Dody Suhartono
- Board of Commissioners
- President Commissioner / Independent Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
 - Commissioner : Melia Suherman
 - Commissioner : Harris Lasmana
 - Commissioner : Sacheen Harris Lasmana
 - Commissioner : Edwin Surya Winarta
 - Independent Commissioner : Ariani Vidya Sofjan
- effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office as stipulated in the Company's Articles of Association.
3. To approve the granting of power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of the Meeting regarding the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a notarial deed, to notify the relevant authorities thereof, and to perform any other actions necessary in connection with such purpose.

EIGHTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provided an opportunity to the shareholders and/or their proxies present to raise questions and/or express opinions related to the Eighth Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders and/or their proxies present at the Meeting who raised any questions and/or opinions.
- As the Eighth Agenda is for reporting purposes, no resolution was adopted for this Agenda.
- The presentation of the Eighth Agenda is as follows :

This agenda was proposed to obtain the Meeting's approval for the amendment/adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as business activities of the Company in order to align with the prevailing Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / "KBLI").

It is hereby informed that based on the Joint Circular Letter of the Minister of Investment and Downstream Industry/Head of the Investment Coordinating Board, the Minister of Law, and the Head of the Central Statistics Agency dated 25 March 2026, "adjustment to KBLI 2025 is not required if the changes only involve adjustments to numerical codes based on the conversion table which do not result in any changes to the substance of the purposes and objectives as well as the scope of business activities as stipulated in the articles of association. Such adjustments are carried out automatically through the Directorate General of Legal Administration System (AHU) and the OSS System based on the conversion table without requiring any amendment to the articles of association."

Based on the foregoing, no discussion was required for the Eighth Agenda of the Meeting, and it was resolved that the Meeting "reaffirms that Article 3 of the Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as business activities of the Company shall remain valid."



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

The above resolutions of the Meeting have been set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated 6 April 2026 Number 08, drawn up before me, Notary. The copy of such deed is currently in the process of completion at our office.

Thus, this summary is hereby submitted prior to the delivery of the copy of the aforementioned deed, which I, the Notary, will deliver to the Company upon completion.

Sincerely yours,
Notaris in Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.